
ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM MENGATASI PERMASALAHAN GIZI DI INDONESIA: PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN PUBLIK

WILLIAM N. DUNN

Oleh:

Vanessa Me

Universitas Terbuka

Alamat: JL. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten (15437).

Korespondensi Penulis: 048335862@ecampus.ut.ac.id.

Abstract. *Public policy plays a crucial role in addressing various social issues, including nutritional problems categorized under the triple burden of nutrition in Indonesia. The Free Nutritious Meal Program (MBG) has been introduced as a strategic government policy to improve access to nutritious food for vulnerable groups. However, its implementation still faces several challenges, such as food quality, distribution issues, and uneven public acceptance. This study employs a descriptive qualitative method with a critical systemic thinking approach. Data were obtained through a literature review from various sources, including journals, books, news articles, and relevant policy documents, and were analyzed descriptively. The findings indicate that, from an efficiency perspective, the MBG program has potential economic benefits, although its budgetary implications remain debated. In terms of adequacy, the program has not yet fully met nutritional standards. From an equity perspective, program distribution remains concentrated in Java and faces challenges in remote areas. In terms of responsiveness, the program addresses the community's need for improved access to nutritious food. Regarding appropriateness, MBG is considered a more comprehensive policy compared to previous initiatives. The effectiveness of the MBG program is influenced by factors such as implementation quality, infrastructure readiness, and human resource capacity. The critical systemic thinking approach highlights that policy success depends on the*

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM MENGATASI PERMASALAHAN GIZI DI INDONESIA: PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN PUBLIK

WILLIAM N. DUNN

government's ability to integrate multiple perspectives and address existing social complexities. The MBG policy has strong potential to be effective and sustainable, but requires improvements in quality, distribution, and equity to achieve its objectives optimally.

Keywords: Program Distribution, Policy Effectiveness, Nutrition, Public Policy, MBG.

Abstrak. Kebijakan publik berperan penting dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial, termasuk isu gizi yang tergolong dalam *triple burden of nutrition* di Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan akses pangan bergizi bagi kelompok rentan. Namun, implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kualitas makanan, distribusi, dan penerimaan masyarakat yang belum merata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan *critical systemic thinking*. Data diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel berita, dan dokumen kebijakan yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek efisiensi, program MBG memiliki potensi manfaat ekonomi meskipun masih diperdebatkan dari sisi anggaran. Dari aspek kecukupan, program belum sepenuhnya memenuhi standar gizi. Dari aspek pemerataan, distribusi program masih terpusat di Pulau Jawa dan menghadapi kendala di wilayah terpencil. Dari aspek responsivitas, program mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan akses pangan bergizi. Dari aspek ketepatan, MBG dinilai sebagai kebijakan yang lebih komprehensif dibandingkan kebijakan sebelumnya. Efektivitas program MBG dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas implementasi, kesiapan infrastruktur, serta kapasitas sumber daya manusia. Pendekatan *critical systemic thinking* menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai perspektif dan mengatasi kompleksitas sosial yang ada. Kebijakan MBG berpotensi efektif dan layak untuk dilanjutkan, namun memerlukan perbaikan pada aspek kualitas, distribusi, dan pemerataan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Distribusi Program, Efektivitas Kebijakan, Gizi, Kebijakan Publik, MBG.

LATAR BELAKANG

Kebijakan publik adalah apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik dilakukan maupun tidak, yang berkaitan dengan masalah publik. Kemudian, hal tersebut dirumuskan dalam bentuk undang-undang, peraturan, maupun program guna mencapai tujuan bersama, memecahkan berbagai permasalahan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Igirisa, 2022). Kebijakan publik hadir untuk mengatasi masalah dan menjembatani antara kepentingan perusahaan dan hak masyarakat. Kebijakan publik juga hadir dalam isu-isu sensitif seperti permasalahan perdagangan manusia, narkoba, dan tembakau yang perlu diregulasikan secara cermat karena berpotensi mencederai kesejahteraan rakyat, utamanya anak-anak (Riswanda, 2023).

Kebijakan publik juga diperlukan untuk mengatasi isu yang telah lama menjadi permasalahan, utamanya yang berkaitan dengan kelompok rentan. Salah satu permasalahan tersebut yang berusaha dituntaskan oleh Indonesia adalah terkait *triple burden of nutrition*. Tiga permasalahan tersebut yakni gizi kurang (*stunting*, *wasting*, *underweight*), gizi lebih (obesitas), defisiensi gizi mikro (kekurangan zat besi, yodium, vitamin A, dan lainnya (Septati, 2025). Mengacu pada data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional ialah 19,8%, menurun cukup signifikan dari 21,5% dibandingkan tahun 2023. Angka tersebut masih berada di batas aman yang ditetapkan WHO (< 20%) dan masih jauh dari target nasional sebesar 14% pada tahun 2029.

Salah satu kebijakan yang diusung untuk mengatasi hal tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini adalah program unggulan Presiden Prabowo-Gibran yang tertuang dalam Asta Cita. Pada tanggal 6 Januari 2025, program MBG telah resmi dilaksanakan dengan target penerima manfaat di tahun 2025 sebanyak 82,9 juta orang dengan dilayani oleh 32.000 SPPG (Idris et al., 2025). Program MBG ditargetkan untuk kelompok penerima manfaat yaitu balita, peserta didik jenjang Pendidikan Usia Dini (PAUD) hingga SMA baik swasta maupun negeri. Selain itu, program ini juga menargetkan ibu hamil dan menyusui.

Dasar regulasi dalam implementasi adalah Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 terkait Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN). Hingga per Agustus 2025, program ini telah menelan biaya APBN sebesar 1,2 Triliun. Dalam implementasinya, MBG menghadapi sejumlah tantangan. Menurut penelitian Idris et al., (2025) masyarakat

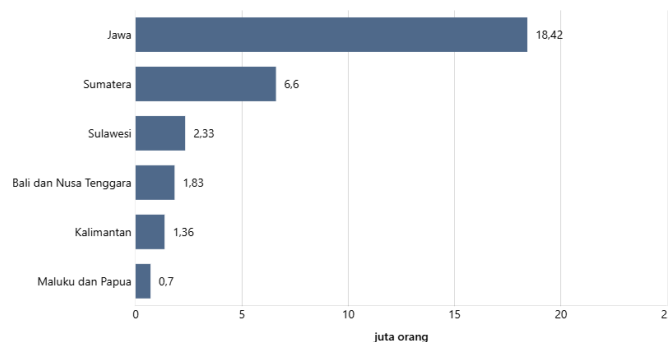
ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM MENGATASI PERMASALAHAN GIZI DI INDONESIA: PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN PUBLIK

WILLIAM N. DUNN

mulanya sangat optimis terhadap MBG, kemudian mengalami pergeseran pandangan menjadi negatif dan menganggap program tidak efektif dan terkesan membuang anggaran sebab berbagai permasalahan yang ada di lapangan. Berbagai isu dan permasalahan di lapangan antara lain adalah kasus keracunan makanan

MBG yang berimbas pada pelarangan orang tua terhadap anaknya untuk mengkonsumsi makan siang gratis di sekolah (BBC, 2025b). Sejumlah sekolah mengeluhkan terlambatnya distribusi MBG maupun kualitas MBG yang dinilai kurang memenuhi standar. Bahkan, sejumlah survey melaporkan bahwa terdapat menu MBG yang diterima basi sebanyak 35,9% dari keseluruhan informan (Ridwan, 2025b).

Selain itu, penerimaan MBG masih belum merata. Meskipun ditujukan untuk mengatasi permasalahan gizi dan nutrisi, ternyata penerimaan MBG masih berpusat di Jawa. Berdasarkan Katadata (2025), penerima manfaat MBG sebanyak 31,2 juta orang. Namun, penerima manfaat mayoritas masih di Pulau Jawa dengan persentase 59% dari total penerima MBG. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini:



Gambar 1. Penerima MBG Berdasarkan Pulau Per Oktober 2025

Sumber: Katadata (2025)

Berbagai permasalahan dalam satu tahun implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan pertanyaan publik, yakni apakah program tersebut efektif atau tidak. Menurut *Rapid Assasement* yang dilakukan oleh Ombudsman RI (2025) dalam Siaran Pers Nomor 52/HM.01/IX/2025. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan empat potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan program MBG ini, yakni 1) penundaan berlarut; 2) diskriminasi; 3) tidak kompeten; dan 4) penyimpangan prosedur. Temuan tersebut memperkuat dugaan masyarakat bahwa program MBG tidak efektif.

Guna menyimpulkan suatu kebijakan efektif atau tidak, perlu suatu analisis secara mendalam dan tidak klain secara sepihak. Efektif artinya mampu mencapai tujuan yang

dikehendaki, utamanya dalam mengatasi suatu permasalahan. Kebijakan publik yang tidak efektif akan berdampak pada gagalnya pemenuhan kebutuhan serta kepentingan masyarakat (Sutmasa, 2021). Menurut William N. Dunn (dalam Putri & Purnamasari, 2025) menyebutkan bahwa sejumlah variabel guna memastikan suatu kebijakan publik itu efektif antara lain adalah melalui variabel efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Sejumlah studi menganalisis MBG dari berbagai sisi, misalnya penelitian yang dilakukan oleh (Idris et al., 2025) yang berfokus pada pendapat publik dalam melihat kebijakan MBG. Dalam studi tersebut, diungkapkan bagaimana respon publik melalui sosial media yang mulanya optimis namun kemudian mulai pesimis sebab implementasi di lapangan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam studi (Kiftiyah et al., 2025) berfokus dari sisi substansi kebijakan namun belum menilai efektivitas kebijakan ini secara menyeluruh. Padahal, efektivitas suatu kebijakan sangat penting, guna mendukung keberlanjutan program atau advokasi kebijakan guna menghentikan suatu program. Guna menganalisis hal tersebut, harus memperhatikan berbagai sudut pandang sehingga penilaian tidak berat sebelah (Riswanda, 2022).

Berdasarkan latar belakang diatas, artikel ini berusaha mengkaji efektivitas program MBG dengan teori efektifitas kebijakan oleh Dunn. Artikel ini berjudul “”. Dengan adanya kajian kebijakan publik ini, maka dapat disimpulkan secara teoritis apakah kebijakan layak dilanjutkan ataukah tidak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berfokus pada pengamatan fenomena atau gejala yang terjadi secara alami (Abdussamad, 2021). Sementara itu, pendekatan yang digunakan adalah analisis kualitatif *critical systemic thinking*. Data yang didapatkan melalui studi literatur yang telah dikumpulkan antara lain adalah jurnal, artikel berita, berkas kebijakan, buku-buku, dan berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya dan dianalisis, diolah secara deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih sebab mempertimbangkan kompleksitas sosial-politik yang ada di era kontemporer ini, dimana masyarakat cenderung mengalami degradasi kepercayaan terhadap institusi

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM MENGATASI PERMASALAHAN GIZI DI INDONESIA: PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN PUBLIK WILLIAM N. DUNN

publik. Peneliti berupaya semaksimal mungkin untuk mereduksi dan memurnikan sehingga diperoleh makna fenomena yang sesungguhnya (Nasution, 2023).

Critical systemic thinking memberi apresiasi pada dalamnya argumen yang dianalisis dari ketidaksempurnaan rasionalitas yang keluar dari tipikal realitas keseharian masyarakat yang bersesuaian dengan konteks keberadaannya. Keseimbangan perspektif *etic* dan *emic* peneliti menentukan seberapa jauh *critical systemic thinking* memperkaya metode penelitian kebijakan (Riswanda, 2024).

Dapat diketahui bahwa *critical systemic thinking* pada dasarnya ialah satu dari berbagai pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kebijakan publik dengan mendorong kreativitas peneliti kebijakan dalam memadukan teknik riset dengan kombinasi multi-perspektif yang relevan dengan kajian penelitian. Hal ini kemudian mampu menjembatani peneliti dengan pembuat kebijakan dan menghilangkan sekat (*boundary judgement*) antar argumen para kaum marjinal dengan kaum yang memiliki pengaruh dalam pembuatan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut William N. Dunn, variabel untuk meninjau apakah suatu kebijakan efektif ataukah tidak adalah melalui variabel efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam kaitanya kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG), penjelasan atas variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Efisiensi (*Efficiency*)

Hal ini berkaitan dengan rasionalitas ekonomi, dimana hal ini berkaitan dengan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang mana umumnya dihitung dengan biaya moneter. Efisiensi umumnya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit atau per produk atau layanan. Menurut Dunn, biaya yang kecil dengan manfaat maksimal disebut sebagai efisien.

Anggaran yang disediakan untuk MBG yakni sebanyak 71 triliun rupiah, dimana angka tersebut berpotensi pemborosan untuk anggaran negara serta dapat memangkas anggaran pada sektor lain. Hal tersebut turut dikonfirmasi oleh Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (Equitas) UGM (2025) bahwa

program MBG dinilai menghadapi tantangan yang besar dan pemborosan karena sifatnya yang universal.

Meskipun demikian penelitian yang dilakukan oleh bahwa terdapat efek pengganda adanya MBG ini. Pengeluaran yang dilakukan oleh negara untuk program MBG tidak hanya berakhir konsumtif, melainkan disebutkan sebagai wujud investasi ekonomi dan mampu mendongkrak PDB. Hal ini dapat dilihat dari proyeksi tabel dibawah ini:

Tahun	Jumlah sasaran (juta orang)	Estimasi Biaya MBG (Triliun)	Estimasi Daya Dorong Terhadap PDB (Triliun)
2025	19,47	71	4.510,0
2026	30,46	109,7	6.967,2
2027	41,45	149,2	9.479,4
2028	62,18	223,8	14.219,1
2029	82,9	298,4	18.958,8

Gambar 2. Estimasi Manfaat Ekonomi Program MBG

Sumber: INDEF (2024)

Berdasarkan hasil estimasi regresi linier, program MBG diasumsikan bahwa tiap 1 Triliun belanja pendidikan akan meningkatkan nilai PDB sebesar 63, 52 Triliun. Selain itu, menurut proyeksi tersebut, tiap seribu rupiah yang dikeluarkan akan mampu memberi manfaat ekonomi hingga 63.500 rupiah. Sehingga berdasarkan analisis tersebut, program MBG telah mencukupi variabel efisien. Meskipun demikian, tabel proyeksi tersebut memiliki makna bahwa angka proyeksi adalah suatu estimasi dan harapan. Dengan kata lain, kebijakan perlu dilaksanakan dengan tepat sasaran dan diimplementasikan dengan baik sehingga mampu mencapai potensi terbaiknya.

Kecukupan (*Adequacy*)

Hal ini merupakan kebijakan publik yang berkaitan dengan seberapa jauh tingkat efektivitas mampu memuaskan kebutuhan, nilai, serta kesempatan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Apabila ditinjau dari tujuan dari progam MBG, tujuan utama yang hendak diatasi adalah terkait *triple burden of nutritions* utamanya kekurangan gizi anak, stunting, dan akses makanan bergizi yang timpang.

Sementara itu, implementasi MBG di lapangan menunjukkan bahwa nutrisi yang terkandung dalam menu MBG kerap kali tidak mencukupi standar. BBC Indonesia (2025)

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM MENGATASI PERMASALAHAN GIZI DI INDONESIA: PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN PUBLIK

WILLIAM N. DUNN

melaporkan, bahwa pemeriksaan gizi yang dilakukan menemukan bahwa setelah mengamati enam jenis sajian menu Makanan Bergizi Gratis (MBG), hanya satu yang memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi sesuai dengan Permenkes No. 28 Tahun 2019 RI. Sebagai contoh, pada takaran isi piring anak Sekolah Dasar, kalori yang harus terpenuhi sekurang-kurangnya adalah antara 500-700 dan didalamnya terkandung unsur karbohidrat, protein nabati dan hewani, lemak, dan vitamin. Namun, realitas di lapangan kecukupan nutrisi tersebut jarang sekali terpenuhi.

Perataan (*Equity*)

Perataan dalam kebijakan publik memiliki makna bahwasannya terdapat keadilan dalam sasaran kebijakan publik. Dunn dalam hal ini menyebutkan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berkaitan dengan rasionalitas legal dan sosial yang merujuk pada kelompok-kelompok yang berbeda di masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan harus mampu rata dan adil dalam pendistribusiannya.

Program MBG dari segi pemerataan masih sangat jauh dari kata adil, sebab mayoritas penerimanya masih berada di Pulau Jawa. Sementara itu, target yang hendak dicapai oleh pemerintah adalah untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap makanan bergizi. Di Papua, proses distribusi terhambat sebab medan dan lokasi yang sulit dilalui (Tempo, 2025). Permasalahan tersebut sejatinya adalah ketimpangan infrastruktur yang telah lama menjadi permasalahan di sejumlah daerah di Papua, dengan demikian, program MBG turut terhambat dalam rangka distribusi yang kemudian menyebabkan pemerataan sulit untuk tercapai.

Tidak hanya dari segi medan yang sulit dilalui, Fasilitas yang kurang memadai dan juga tenaga kerja yang belum mumpuni turut berkontribusi terhadap terhambatnya MBG. Hingga awal Agustus 2025, tiga kabupaten di Papua Barat Daya belum memiliki dapur MBG (Trisnah, 2025). Berbagai fasilitas dasar seperti air dan listrik belum tersedia di sejumlah dapur MBG di Papua. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan MBG masih jauh dari kondisi yang inklusif atau merata.

Responsivitas (*Responsiveness*)

Variabel responsivitas dalam kebijakan publik dapat dimaknai sebagai respon dari suatu aktivitas yang maknanya adalah tanggapan tepat sasaran. Hal ini menurut Dunn adalah seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, maupun nilai kelompok dari masyarakat tertentu. Dengan kata lain, suatu kebijakan akan dianggap berhasil apabila mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Studi Kiftiyah et al., (2025) menunjukkan bahwa MBG mampu menjadi jawaban atas adanya kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. MBG diberikan kepada seluruh siswa secara merata, sehingga mampu memberikan kesempatan bagi siswa yang kurang mampu. MBG juga dipandang sebagai langkah menuju sistem pendidikan yang modern serta difusi inovasi.

Praktik memberikan makanan bergizi gratis di sekolah tidak pertamakali dilakukan oleh Indonesia. Di Jepang, program pemberian makan siang bergizi telah lama dilakukan, yakni “*Kyushoku*” yang telah hadir sejak tahun 1947 dengan menu makanan seimbang dan edukasi gizi (Waida & Kawamura, 2022).

Selain itu, Amerika Serikat memiliki program bernama *National School Lunch Program* (NSLP) yang ditujukan untuk jutaan siswa dari keluarga berpenghasilan rendah, dan Finlandia yang dikatakan memiliki program makanan sekolah terbaik di dunia yang mencakup pemberian makanan dengan standar gizi ketat dan menu makanan sehat (Park, 2024). Dalam studi INDEF juga diungkapkan, bahwa negara-negara dengan pendapatan serupa Indonesia yakni menengah juga turut melaksanakan program serupa untuk mengatasi permasalahan gizi, meskipun menghadapi sejumlah tantangan dari segi pemerataan (INDEF, 2024).

Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan menurut Dunn adalah kriteria yang digunakan untuk menyeleksi alternatif guna dijadikan suatu rekomendasi apakah hasil dari alternatif itu dapat menjadi pilihan tujuan yang layak. Hal ini dapat dimaknai bahwa kebijakan dikatakan tepat apabila hal tersebut adalah kebijakan terbaik baik secara nilai dan kondisi dibandingkan kebijakan-kebijakan alternatif lainnya.

Sebelum diimplementasikan kebijakan MBG, pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi *triple burden of nutrition*s. Di era pemerintahan Joko Widodo,

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM MENGATASI PERMASALAHAN GIZI DI INDONESIA: PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN PUBLIK

WILLIAM N. DUNN

masalah stunting direspon dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang menekankan tentang Strategi Nasional yang terdiri dari pilar-pilar strategi. Meskipun terdapat penurunan angka stunting, namun hasilnya masih sangat jauh dari target nasional. Sementara itu, MBG mampu memberikan kerangka kerja kebijakan yang secara jelas dan terukur untuk mengatasi permasalahan gizi yang ada. Dengan demikian, kebijakan MBG adalah suatu kebijakan baru dibandingkan dengan kebijakan yang sebelumnya dan dikatakan lebih baik secara nilai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis pembahasan diatas, maka dapat dimaknai bahwa kebijakan ini layak dilanjutkan, karena dapat berada di kondisi ideal dan efektif dengan catatan mampu mengatasi kesenjangan di sejumlah variabel yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Artikel ini memiliki kekurangan, sebab dalam menilai efektivitas kebijakan MBG dilakukan di tahun pertama. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya. Bagi pemerintah, diharapkan untuk memperhatikan kualitas makanan, distribusi, dan kesenjangan penerimaan dalam implementasi kebijakan. Diharapkan kebijakan ini mampu menghasilkan output yang diharapkan di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian KUALITATIF*. Makassar: Syakir Media Press.
- Agungnoe. (2025). *Program MBG Dinilai Berisiko Pemborosan, Sebaiknya Diprioritaskan pada Anak Keluarga Kurang Mampu*. UGM (<https://Ugm.Ac.Id/Id/Berita/Program-Mbg-Dinilai-Berisiko-Pemborosan-Sebaiknya-Diprioritaskan-Pada-Anak-Keluarga-Kurang-Mampu/>).
- BBC. (2025a). *Program makan bergizi gratis andalan Presiden Prabowo Subianto “belum memenuhi standar kebutuhan gizi.”* BBC Indonesia (<https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Articles/Cd0e05p7n1go>).
- BBC. (2025b). *Ribuan siswa keracunan Makan Bergizi Gratis, orang tua trauma dan larang anaknya konsumsi MBG – “Bukannya meringankan malah mau membunuh.”* BBC (<https://Www.Bbc.Com/Indonesia/Articles/Cm2zney05ypo>).

- Idris, I., Wangge, G., W, I., Riekasapti, T. A., Annisa, & Amalia, N. (2025). From Hope to Despair: Evaluation of MBG's Narrative and Public Communication on X, Instagram, & TikTok (Jan- Sep 2025). *Monash Data & Democracy Reserch Hub*.
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Tanah Air Beta.
- INDEF. (2024). *Efek Pengganda Program Makan Bergizi Gratis*.
- Katadata (<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Demografi/Statistik/691d381ae145e/Survei-359-Remaja-Ri-Penerima-Mbg-Pernah-Dapat-Makanan-Basi>).
- Kementerian Keuangan
(<https://Mediakeuangan.Kemenkeu.Go.Id/Article/Show/Program-Mbg-Buka-Akses-Gizi-Sehat-Untuk-Masyarakat-Indonesia>).
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101–112.
<https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>
- Nasution, A. F. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: Harfa Creative.
- Ombudsman RI. (2025). *Ombudsman RI Temukan Empat Potensi Maladministrasi dalam Program Makan Bergizi Gratis*. Ombudsman RI
(<https://Ombudsman.Go.Id/News/r/Ombudsman-Ri-Temukan-Empat-Potensi-Maladministrasi-Dalam-Program-Makan-Bergizi-Gratis>).
- Park, J. (2024). Food is Medicine: A Review of Current Government School Lunch Food is Medicine: A Review of Current Government School Lunch Policies Across America Policies Across America. *Undergraduate Research Journal for the Human Sciences*, 17. <https://newprairiepress.org/urjhs>
- Putri, Z. A., & Purnamasari, H. (2025). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang: Perspektif Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 6(2), 114–126.
<https://doi.org/10.18196/jpk.v6i2.22500>
- Ridwan, A. (2025a). *Jumlah Penerima MBG per 3 Oktober 2025, Pulau Jawa Terbanyak*. Katadata
(<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Demografi/Statistik/68f19735c4ff6/Jumlah-Penerima-Mbg-per-3-Oktober-2025-Pulau-Jawa-Terbanyak>).

**ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
(MBG) DALAM MENGATASI PERMASALAHAN GIZI DI
INDONESIA: PERSPEKTIF TEORI KEBIJAKAN PUBLIK
WILLIAM N. DUNN**

- Ridwan, A. (2025b). *Survei: 35,9% Remaja RI Penerima MBG Pernah Dapat Makanan Basi*.
- Riswanda. (2022). *Bernalar Kritis dalam Sebuah Dialektika Kebijakan*. CV. Sintesia.
- Riswanda. (2023). *Menerapkan Literasi Kebijakan Publik: Seri Tembakau, Narkoba, Pornografi, dan Perdagangan Orang*. Mazda Media.
- Riswanda. (2024). *Menafsirkan Paradigma Penelitian Kebijakan Publik*. CV. Sintesia.
- Septati, D. I. (2025). *Program MBG: Buka Akses Gizi Sehat Untuk Masyarakat Indonesia*.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Cakrawati*, 04(1).
- Tempo.co. (2025). Bupati di Papua Pegunungan: Makan Bergizi Gratis Sulit Dilaksanakan, Tak Ada Anggaran Hingga Kendala Akses. *Tempo* (<https://www.tempo.co/politik/bupati-di-papua-pegunungan-makan-bergizi-gratis-sulit-dilaksanakan-tak-ada-anggaran-hingga-kendala-akses-1209864>).
- Trisnah. (2025). Tiga Kabupaten Belum Memiliki Dapur Makan Bergizi Gratis. *Sorongraya.Com* (<https://sorongraya.co/metro/tiga-kabupaten-belum-miliki-dapur-makan-bergizi-gratis/>).
- Waida, Y., & Kawamura, M. (2022). Japanese School Lunch and Food Education. In *School Food, Equity and Social Justice: Critical Reflections and Perspectives* (pp. 171–186). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781003112587-15>